

351-72

006

1994



LAPORAN HASIL PENELITIAN

STUDI EMPIRIS TENTANG PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PADA DEPARTEMEN DALAM NEGERI

OLEH:

DRS. AGUS PURWANTO, AKT

DAN TIM

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS DIPONEGORO

1994

DIBIYAI DENGAN DANA PROYEK OPERASI DAN PERAWATAN FASILITAS

UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR : 201/XXIII/3/--/1994

TANGGAL 28 MARET 1994

RINGKASAN

Anggaran Pemerintah merupakan suatu ikhtisar taksiran pengeluaran-pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan di masa yang akan datang, dengan data penerimaan dan pengeluaran yang sebenarnya pada periode yang sedang berjalan dan periode lalu. Pengertian anggaran negara (APBN) tidak hanya mempunyai unsur ekonomis, tetapi lebih banyak penekanan pada unsur juridis.

Dari hasil implementasi anggaran di Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai sistem anggaran yang dipakai di Indonesia.. Departemen Dalam Negeri dalam hal ini dianggap merupakan sub-sistem yang mewaliki sistem pemakaian anggaran.

Atas dasar analisis dan evaluasi sistem anggaran serta pengenalan pokok tentang konsep Planning Programming Budgeting System, konklusi yang diperoleh bahwa berbagai kelemahan yang timbul dari sistem anggaran Tradisional dan Performance dapat ditutup dengan menerapkan PPBS. Dapat dikatakan konsep PPBS merupakan sistem anggaran ideal dan relatif sempurna dibandingkan dengan kedua sistem yang terdahulu.

PPBS dengan sifat kerjanya yang analitis menghasilkan hasil-hasil positif di negara lain, tidak berarti akan memberikan jawaban-jawaban atas semua permasalahan di negara kita. Hasil yang diperoleh dapat maksimal dan positif, tergantung pada pengelolaan administrasi negara dengan cara menggabungkan konsep-konsep pemikiran PPBS yang disesuaikan dengan faktor-faktor lingkungan di Indonesia.

SUMMARY

The fund is a abstract estimation revenues and expenditures wished on the future time, base on the real data revenues and expenditures in this period and in the past time. The definition of fund doesn't only have economy principle but also justice principle.

The result implementation of budget on Department of home country can get discription completely about budget system used in Indonesia. Department of home country is assumed a sub-system that represent the using budget system.

Base on the analysis and evaluation budget system and the knowledge concept of Planning Programming Budgeting System we can get conclusion that the weakness of Traditional Budget System and Performance Budget System can be eliminate by the application of Planning Programming Budgeting System. On the other hand, The Planning Programming Budgeting System is more ideal and perfect budget system than the other ones.

PPBS that has the analitical working has taken the positif result in the other country. However, It does not answer all problem completely in our country. We will achieve the maximum result if we can adjust the application of PPBS with the environment factors in Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang tak terhingga kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat restu-Nya akhirnya kami dapat menyelesaikan laporan penelitian ini.

Dalam proses penyusunan laporan penelitian ini kami mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas sumbangan, pemikiran, dan bantuan dalam bentuk apapun terutama kepada Rektor Universitas Diponegoro Semarang, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Kepala Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri yang telah memberikan data-data dan informasi yang kami butuhkan.

Kami menyadari bahwa kami tidak dapat membalas secara langsung atas segala budi baik beliau. Kami hanya dapat berdoa semoga mereka selalu dikaruniai berkah dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Akhirnya kami mengharapkan laporan penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi.

Semarang, 15 Maret 1995

Peneliti,

Drs. Agus Purwanto, Akt
dan tim

DAFTAR ISI

RINGKASAN DAN SUMMARY

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I . PENDAHULUAN	1
II . TINJAUAN PUSTAKA	3
1. Traditional Budgeting System	4
2. Performance Budgeting System	5
3. Planning Programming Budgeting System	6
III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	8
IV . METODE PENELITIAN	9
1. Pengumpulan data	9
2. Analisis Data	11
V . HASIL DAN PEMBAHASAN	11
1. Konsep PPBS	11
2. Penerapan PPBS di DEPDAGRI	13
VI . KESIMPULAN DAN SARAN	23
1. Kesimpulan	23
2. Saran	24

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

Eksistensi sebuah negara pada hakekatnya mengemban kepentingan-kepentingan rakyat. Pengaruh dari keanekaragaman cara hidup, kepercayaan, keadaan alam lingkungan dan perbedaan sosial ekonomi dapat mempertajam kepentingan tersebut. Pemerintah merupakan sarana yang mengatur warganya, secara nyata akan tercermin dari fungsinya dalam mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan berbagai pihak pada satu arah tujuan nasional. Dalam menjalankan fungsinya baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, administrasi maupun dalam bidang pembangunan, pemerintah dihadapkan pada suatu fakta terbatasnya dana. Dengan demikian pengelolaan dana merupakan pokok yang terpenting demi tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

Dana adalah sumber yang terbatas dan keterbatasan ini lebih terasa di dalam negara yang sedang membangun seperti halnya Indonesia. Pendayagunaan dana yang terbatas harus dikaitkan dengan perencanaan dan pengawasan yang teliti dan matang, sehingga menghasilkan nilai yang maksimal. Perencanaan akan tertuang dalam rencana-rencana keuangan yang dinamakan anggaran atau budget, dan anggaran untuk negara disebut anggaran negara. John F. Due mengatakan :
(T John F. Due, 1963).

A budget ... is a financial plan for a specified period of time. A governmental budget, therefore is a statement of proposed expenditures and expected revenues for the coming period, together with data of actual expenditures and and revenues for current and past periods.

Anggaran adalah suatu rencana keuangan yang ditetapkan untuk suatu periode tertentu. Anggaran pemerintah merupakan suatu ikhtisar taksiran pengeluaran-pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan di masa yang akan datang, dengan data pengeluaran dan penerimaan yang sebenarnya pada periode yang sedang berjalan dan periode yang lalu. Dari definisi tersebut di atas dapat diketahui bahwa anggaran merupakan rencana yang dinyatakan dalam bentuk uang, memuat taksiran penerimaan dan pengeluaran untuk suatu periode tertentu.

Pengertian anggaran negara (APBN) tidak hanya mempunyai unsur ekonomis, tetapi lebih banyak penekanannya pada unsur juridis. Berikut ini akan diuraikan pengertian anggaran negara (APBN). Bijloo mendefinisikan anggaran negara sebagai berikut: Komite Penterjemah Departemen Keuangan RI, 1981)

Anggaran adalah suatu rencana kerja keuangan, berisikan disatu pihak jumlah pengeluaran tertinggi yang dalam suatu jangka waktu di masa datang kira-kira akan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara, dan di lain pihak jumlah pendapatan yang diperkirakan dalam jangka waktu yang sama akan diterima oleh negara.

Dari definisi ini terlihat bahwa suatu anggaran negara merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah. Rencana kerja pemerintah jangka panjang meliputi jangka waktu 25 sampai dengan 30 tahun, yang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) disebut Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang.

Usaha ke arah peningkatan efisiensi mempunyai implikasi pada perkembangan sistem anggaran yang menuju sistem yang dianggap terbaik untuk memenuhi fungsi perencanaan dan pengawasan. Berdasarkan atas perkembangan sistem anggaran dapat dikategorikan atas: (T Rosjidi, 1987)

- Tradisional Budgeting System.
- Performance Budgeting System.
- Planning. Programming Budgeting System.

Perkembangan sistem anggaran mengakibatkan perbedaan orientasi dari masing-masing sistem yang dengan sendirinya menimbulkan perbedaan: siklus anggaran, klasifikasi anggaran dan sistem informasi yang diciptakan dan dibutuhkan.

Titik tolak pembahasan di dasarkan atas perkembangan sistem anggaran dengan tujuan utama menelaah perbedaan sistem dalam kaitannya dengan implementasi anggaran di Indonesia. Mata rantai anggaran akan selalu dihubungkan dengan pelaksanaan antara lain cara pencatatan, pengawasan dan pertanggungjawabannya, dapat dikatakan melibatkan governmental accounting (akuntansi pemerintahan) sebagai aplikasi nyata, sistem anggaran dan akuntansi pemerintahan pada Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri merupakan obyek analisa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tiap-tiap negara menggunakan sistem anggaran negara yang berbeda. Dan perbedaan ini, di samping akan menyebabkan timbulnya perbedaan dalam orientasi penekanannya, juga akan menyebabkan timbulnya perbedaan dalam sistem akuntansinya. Walaupun demikian, dalam setiap sistem anggaran negara hampir selalu terdapat tiga aspek sebagai berikut: aspek